

**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR: 0007/KP.01.01/08/2022

NOMOR: 2781/J2/PP.01.00/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (01-08-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. IBRAHIM MALIK
TANJUNG**

Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10240 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. DEWI ANDAYANI

Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Raya Ciputat-Parung Km. 19, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok

16517, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

- (1) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Dasar;
- (4) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

- (5) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- (6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-115.01.01.1.500100/2022 Revisi ke-6 tanggal 2 Juni 2022.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kontrak Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS bagi CPNS **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Kontrak Kerja Sama ini adalah untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompetensi, profesional yang berkarakter di lingkungan unit kerja **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini yaitu penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS bagi Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. Mengirimkan data peserta Pelatihan Dasar CPNS kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan dan menyetorkan biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana jumlah peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyediakan mentor dan peserta Pelatihan Dasar CPNS;
 - d. Menyampaikan nilai Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Menyampaikan penilaian sikap perilaku kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS **PIHAK KESATU**;
- b. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS **PIHAK KESATU**;
- c. Menyediakan pengajar, *coach*, dan penguji;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan Dasar, antara lain, alat penunjang pembelajaran dan paket data internet bagi peserta, Pelatihan Dasar CPNS **PIHAK KESATU**;
- e. Menyiapkan administrasi pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan program Pelatihan Dasar CPNS;
- f. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS kepada **PIHAK KESATU**;
- g. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
- h. Memfasilitasi proses registrasi peserta melalui Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA), Lembaga Administrasi Negara.

(3) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Mendapatkan Pelatihan Dasar bagi CPNS **PIHAK KESATU** sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapatkan alat penunjang pembelajaran bagi peserta sesuai standar yang ditetapkan;
- c. Mendapatkan paket data internet bagi peserta;
- d. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus;
- e. Menerima dokumen digital Rancangan Aktualisasi dan Laporan Aktualisasi peserta Pelatihan Dasar CPNS;
- f. Menerima laporan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS; dan
- h. Menerima data kelulusan peserta Pelatihan Dasar CPNS sebagai data alumni **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima data peserta Pelatihan Dasar CPNS;
- b. Menetapkan Pengajar, *Coach*, dan Penguji;
- c. Menerima pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;

- d. Menerima nilai hasil PKTBT;
- e. Menerima penilaian sikap perilaku peserta Pelatihan Dasar CPNS; dan
- f. Menetapkan kelulusan peserta Pelatihan Dasar CPNS **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 PESERTA

Peserta Pelatihan Dasar CPNS dari **PIHAK KESATU** sebanyak **132** (seratus tiga puluh dua) orang Golongan III sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Kerja Sama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Semua biaya yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, dengan total biaya Pelatihan Dasar CPNS untuk 132 (seratus tiga puluh dua) orang peserta x Rp5.260.000,- = **Rp694.320.000,-** (enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan sebagai berikut:
 - a. Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dikelola langsung oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pembayaran terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS kepada pihak-pihak lain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pembayaran biaya Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan transfer langsung ke rekening milik Bendahara Penerimaan **PIHAK KEDUA**, melalui:
Bank : BRI Unit Pondok Cabe Ciputat
Nomor Rekening : 099801000110307
Atas Nama : BPN 088 PUSDIKLAT PE
NPWP : 00.043.271.6-448.000
 - d. Sebelum penyetoran ke Bendahara Penerimaan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** meminta untuk menerbitkan Surat Tanda Setor (STS) kepada **PIHAK KEDUA**;

- (3) Pembayaran dilakukan dalam satu tahap sekaligus paling lambat bulan Agustus 2022;
- (4) Apabila peserta Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana tersebut pada Pasal 5 tidak dapat terkirim seluruhnya berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pembayaran biaya dimaksud dilakukan **PIHAK KESATU** sesuai jumlah peserta yang dikirim.

Pasal 7

STRUKTUR KURIKULUM

- (1) Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk pembentukan karakter dan profesionalitas PNS.
- (2) Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) Jam Pelajaran (JP) atau setara dengan 74 (tujuh puluh empat) hari kerja sebagai berikut:
 - a. Pembelajaran dalam Pelatihan Mandiri selama 48 (empat puluh delapan) JP atau 16 (enam belas) hari kerja menggunakan metode pembelajaran daring secara tidak langsung (*asynchronous*), bertempat di tempat kedudukan Peserta.
 - b. *Distance Learning* melalui *e-learning* selama 25 (dua puluh lima) JP yang dilaksanakan melalui pembelajaran daring secara langsung (*synchronous*) dan 192 (seratus sembilan puluh dua) JP yang dilaksanakan secara *asynchronous*, setara 22 (dua puluh dua) hari kerja.
 - c. Aktualisasi selama selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP atau 30 (tiga puluh) hari kerja bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta; dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - d. Pembelajaran klasikal selama 62 (enam puluh dua) JP atau 6 (enam) hari kerja, bertempat di tempat penyelenggaraan *Blended Learning*.

Pasal 8

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- (1) Pembentukan Karakter PNS dilaksanakan mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di Kediaman Peserta

Pelatihan Dasar CPNS masing-masing pada saat *e-learning* dan di Pusdiklat Pegawai pada saat klasikal;

- (2) Habitulasi dan PKTBT bertempat di masing-masing satuan kerja peserta Pelatihan Dasar CPNS di bawah koordinasi **PIHAK KESATU**;
- (3) Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan metode pembelajaran yang ditentukan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU**

Kontrak Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan peserta berasal dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalan musyawarah dalam mencapai penyelesaian masalah.

Pasal 11 **PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan diatur dalam penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini akan diatur dalam perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Pasal 12
LAIN – LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya beberapa perubahan pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 13
PENUTUP

Kontrak Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



IBRAHIM MALIK TANJUNG

PIHAK KEDUA



DEWI ANDAYANI

Lampiran

NOMOR: 0007/KP.01.01/08/2022

NOMOR: 2781/J2/PP.01.00/2022

**Daftar Peserta Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum**

GOLONGAN III

NO	NIP	NAMA	UNOR INDUK
1	199712202022031001	MUKHLIS SUTYAPUTRA, S.M.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
2	198705182022031001	NASRUL ARIF, S.H	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
3	199507192022031001	NASRUL SAMAD, S.IP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
4	199712012022032014	NI KETUT AYU MAHA PUTRI DEWI, S. Tr. Akt.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali
5	199701042022032001	NI KETUT RIANINGSIH W, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali
6	199806162022032003	NI MADE DWIYANTINI, S.Tr.Akt.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7	199210042022032001	NI PUTU MIRAYANI, S.IP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
8	199506022022032006	NIA KURNIA, S.ST	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
9	199808262022032001	NIKEN PUSPITA NINGSIH, S.Sos.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
10	199712062022032002	NISSI SAFIRA VERISA DJOJOMARDHONO, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
11	199507112022031001	NIVEL SAPUTRA WAHID, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
12	199406232022031001	NOOR MUHAMMAD NASYAR, S.IP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
13	199606152022032001	NOURMA YUNIA ALDILLA RIZQA, S.IP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
14	199111192022032005	NOVALIN BERNADETE HOUMA SILALAH, S.E	Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua
15	199001072022032001	NOVELYSA E H. SAMOSIR, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
16	199211272022032001	NOVITA DWI SYLVIANDHANI, S.E.	Inspektorat Utama
17	198611032022032003	NOVITA WELMINA KAMBUAYA, S.E	Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua
18	199507012022031002	NUGRAHA ADI PERMANA, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo

19	198610102022032002	NUNIK SRI LESTARI, S.Sos.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
20	199812272022032001	NUNUNG SUCIATI, S.IP.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi
21	199409292022032001	NURAENI, S.A.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
22	199606062022032001	NURAINI JIATMIKO, S.Si	Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu
23	199612022022032001	NURHAIDA, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
24	199712192022032003	NYAYU DEVIANA NUR ASYIFA, A.Md. Akun.	Sekretariat Jenderal
25	199809132022032003	OCHA KOMALA DEWI, S.Ak.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
26	199610222022031004	OKSAN DEDI SIREGAR, A.Md	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
27	199310252022032001	OKTIA DWI IRNA AINI, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
28	199705262022032001	PRAMESTI PUTRI ISMAYADEWI, S.M.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
29	198811042022031002	PRASTOWO SANDY ASMORO, S.Si	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
30	199408242022032001	PUTRI CITRA PURNAMAWATI, S.H	Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten
31	199408282022032001	PUTU AGUSTINI EKA PRATIWI W, S.E.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali
32	199808032022032008	RADEN ANNISA PUTERI KUSUMAWARDHANI, S.AP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
33	199806062022031008	RAEHAN EL ABID, S.H	Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
34	199812172022032001	RAHMAYANTI PUTRI DESIRESTA, S.Mat	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
35	199209092022031002	RAIHAN FIRDAUS, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku
36	199704172022032010	RAM WINDA SIAGIAN, S.Sos.	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
37	199912062022032003	RANI KARISMA, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
38	199208142022032001	RASMI JUWITA, S.E.	Inspektorat Utama
39	198705302022032001	RATNA FITRI WULANSARI, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta
40	199702272022032017	RAYU ANITAWATI, S.I.P.	Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta
41	199111112022032001	REGINA NOVAYANA, SH	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
42	199610282022032001	REVA OKTORA, S.I.P	Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu
43	198907272022031001	REZZA BASTIAN SAPUTRA, S.H.,	Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
44	199306152022032001	RHOMAIDA AMBARWATI, S.I.P.	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

45	199603202022032002	RICA USWATUN CHASANAH FAUZIAH, S.Mat	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
46	199306282022031002	RIDHO FERDANA, S.E.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
47	199408292022031001	RIDWAN SAEFUL AZHAR, S.Sos	Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
48	199509282022032001	RIFDAH FAIZAH, S.A	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
49	199805042022032001	RIKA AYU LESTARI, S.Mat.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
50	199410192022032007	RIKA PURNAMA LUBIS, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
51	199409132022031001	RIKI SEPRIYANDA, S.H	Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
52	199611132022031001	RIKKI SONETA NAINGGOLAN, S.Mat	Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
53	199805192022032001	RIMA PUJI ASTUTI, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
54	199010232022032001	RINA RUTH OCTARIANA, S.E	Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua
55	199506042022032002	RINA WINDASARI TURNIP, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
56	199802162022032003	RINDU SIMANJUNTAK, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
57	199308272022032004	RISKA AMALIA PERTIWI, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten
58	199601302022031001	RISMADANI JAYA SAPUTRA, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
59	199409142022032001	RISTI ARUM PUSPITA, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
60	199807122022031001	RIVALDO NOVAL PUTRA SANTOSA, S.I.P.	Bawaslu Provinsi Maluku Utara
61	199812192022031001	RIYAN ALGHI FERMANA, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
62	199602152022031003	RIZKI IRAMDAN FAUZI, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
63	199510202022032001	RIZKY AMALIA AZIZ, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
64	198607262022031002	RIZKY ANINDYAJATI, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
65	199902012022032001	RIZKY DWI KUSUMA, S.I.P.	Sekretariat Jenderal
66	199411302022031001	ROCHMAN ARIF, S.I.P	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
67	199808072022032001	ROSARI INDAH CAHYANINGTYAS, S.E.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

68	199601022022032002	RUTH YANTI PURBA, SE	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
69	199308122022031002	SAHAT F RIVAI LUMBAN TORUAN, S.H	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
70	198811102022032001	SAILI ULFA NUDIYA	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
71	199712162022032001	SALSABILA NADHIFA, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta
72	199507062022031007	SAPRIANDI TANJUNG, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu
73	199709292022032017	SARAH YUNITA TRESTYOWATI, S.Ak	Inspektorat Utama
74	199501192022032001	SARINAH, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
75	199601032022032001	SARINTA BR GINTING, S.I.Pol.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
76	199604142022032001	SASMI ARIESTI M, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
77	199710162022032001	SEKAR ARUM MAHESWARI, S.I.P	Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu
78	199804122022032001	SHERLY MONA FRISCILIA, S.Mat.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
79	199607092022032001	SHOFI NINDYA KISWANTI, S.Sos.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
80	199705312022031002	SIGIT DWI PRASETYO, S.Sos	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
81	198912182022032001	SILVY ARISCA SUSANTI, S.Sos	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
82	199810012022032002	SINDI SYAHMITA, S.Sos.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
83	199810152022032008	SINHA IMA META PUTRI, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
84	199411302022032008	SISILIA BATSEBA MAMBRASAR, S.IP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua
85	199603302022032001	SITI HUSNUL CHATIMAH, S.H	Deputi Bidang Dukungan Teknis
86	199801042022032001	SONIA ELMANITA GINTING, S.H.	Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
87	199708262022032003	SONIA KHARISMA, S.IP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali
88	198701052022031001	SONY SURYA PRAYOGA, SH	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
89	199207092022032002	SRI MELATI, S.Si	Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau
90	199812042022032003	SRIRAHAYU NUR, S.M	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
91	199003092022032001	ST IDAWANI, S.H	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

92	198711012022031001	STEPANUS ALPARIS, S.H	Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
93	199210242022032003	SUFIA NUR JANAH, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta
94	198608282022032001	SUNDARI EKA AGUSTINA, S.E.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
95	199705232022032011	SURANI PUNGKA SARI, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
96	199610052022031001	SURATMAN, S.IP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
97	199506262022032003	SURYA LESTARI, S.AP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
98	199706122022031003	SYARIF ALI KHAN, S.IP.	Bawaslu Provinsi Gorontalo
99	199703042022032001	TIRANIA DEWI PRAMARSELA, S.Si.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku
100	199105292022031001	TRI KUNCORO PRASETYO HUTOMO, S. Si	Sekretariat Bawaslu Provinsi D.I. Yogyakarta
101	199806142022032001	VANYA, S.A.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten
102	199604222022031004	VICKY BAGUS RAMADHAN, S.H	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
103	199107082022032006	VIKA RESTU DIAN SAPUTRI, S.A.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
104	199006262022032003	VIVI SUSANTI, SE	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
105	199712052022032001	WAHYUNINGSIH, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
106	199702042022032001	WAHYUNINGTYAS, S.IP.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
107	198908162022032010	WANDA AYU AGUSTIN, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
108	199008282022031001	WANGSIT RATRI, S.Si	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
109	199307212022031004	WEGIK PRASETYO, S.I.P.	Deputi Bidang Dukungan Teknis
110	199212272022031001	WELTRI HAPPY DAUD, S.E	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
111	199904192022032002	WIDYA RAHMI, S.Ak.	Inspektorat Utama
112	199510122022031005	WIFQY DIMAS WIJAYANTO, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali
113	199104152022032001	WILLY FITRI PRATAMI, S.H	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
114	199309042022032002	WINDA SARI, S.Si	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
115	199801112022031002	YANUAR BAYU RAMADAN, S.AP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
116	199201012022031001	YANUAR JECKSON, S.H	Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten
117	199303202022032002	YESIKA KARINA BR GINTING, SE	Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh
118	199106182022031001	YIPI KINANDRA, S.E	Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung

119	198709022022032003	YOHANA F. AROBAYA, S.E	Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat
120	199704272022032001	YOLA SARTIKA SARI, S.Si	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
121	199812092022031001	YOSINAS MIRZA SETIAWAN, S.IP.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
122	199812272022031001	YUDHISTIRA RAMDHAN PANGESTU, S.H.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
123	199701212022032001	YUDITYA FIRDAUZA YASMIN, S.I.P	Deputi Bidang Dukungan Teknis
124	199307182022032001	YULIA FRANSISCA RERING, S.E.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
125	199702102022032001	YULIANTI SAFITRI, S.H	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
126	199606192022032001	YUNIAZMA ZELIANA, S.Ip	Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
127	199501012022031004	YUSTUS FERDINAND WAIMBO, S.I.P.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat
128	199501082022031004	YUSUF MANGGALA ADITYATAMA, S.A.P	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
129	199404062022032002	ZAHY MUARRIFAT ARASY PADIL, S.Si	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
130	198806012022031001	ZULFIKARNAIN, S.IP	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
131	199503052022031004	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos.	Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara
132	199106202022032002	ZWESTY NOVIZA, S.I.P	Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu